

IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DI KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Hardiyanti¹, Abd Kadir Adys², Sudarmi³

¹Mahasiswa, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

²Dosen, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

³Dosen, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar

ABSTRACK

This study aimed to determine the Implementation of the People's Business Credit Program. People's Business Credit aims to improve people's welfare and living standards through the development of UMKM. This study used qualitative descriptive. It meant the researcher intended to provide an overview of the Implementation Of the People's Business Credit Program in Alla District of Enejang Regency with 9 informants, data sources were primary data and secondary data. The results of this study showed that the people's business credit program worked well with evidence that community satisfaction was achieved in the people's business credit program in Alla Bistrict of Enrekang Regency and the service quality had gone well as the procedure had been applied even though there was a little need to be addressed so that the services provided to the community was satisfied with the people's Business Credit Program.

Keywords : Implementation fo the Business Credit Program.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan UMKM. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Program kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengan informan 9 orang, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kredit usaha rakyat berhasil berjalan dengan baik dengan bukti bahwa adanya kepuasan masyarakat yang tercapai dalam program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan pada kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik sebagaimana prosedur yang sudah berlaku walaupun ada sedikit yang perlu dibenahi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, namun terlepas dari itu masyarakat sudah merasa puas dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat.

Kata Kunci: Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah besar dalam proses pembangunan di Indonesia adalah masalah kemiskinan dimana tingkat kemiskinan di Indonesia yang sangat tinggi sehingga berpengaruh besar dalam proses pembangunan. Kemiskinan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Maka dari itu berbagai kebijakan pemerintah dari berbagai program pembangunan yang inklusif terus digencarkan agar jarak antara yang kaya dan yang miskin bisa dikendalikan. Walaupun kemiskinan masih menjadi masalah pokok yang mempengaruhi kemajuan serta peningkatan dari berbagai pembangunan di Indonesia. Banyak faktor penyebab kemiskinan. Diantara faktor tersebut adalah rendahnya tingkat kemampuan serta pengetahuan, kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sehingga banyak orang menjadi pengangguran tanpa berpenghasilan, tingginya jumlah angka kelahiran dan lain-lain.

Menurut (Wanggai:2012), intervensi pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, dikelompokkan dalam tiga gugus yaitu: Gugus pertama, yakni bantuan sosial berbasis keluarga, Dalam hal ini seperti bantuan sosial masyarakat, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH) serta bantuan sosial lainnya dan langkah-langkah subsidi lainnya yang langsung menyentuh masyarakat secara langsung. Gugus kedua, didalamnya terdapat intervensi pemberdayaan masyarakat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Gugus ketiga yakni program pengembangan ekonomi lokal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan berbagai program lainnya. Di Indonesia UMKM sudah menjadi bagian yang sangat urgen dari sistem perekonomian, hal ini disebabkan karena UMKM merupakan unit usaha yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usaha lain yang

berskala besar serta memiliki keutamaan dalam menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal.

Maka dari itu salah satu yang menjadi program dalam pengembangan ekonomi lokal untuk masyarakat dari pemerintah adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu lahir Program KUR sebagai respon dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan pada tanggal 9 Oktober

2007 sebagaimana kemudian diubah beberapa dengan addendum ke IV pada tanggal 10 Januari 2012 Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Aditya Wardhana dan Zainuddin Iba| Analisis Kinerja Implementasi Program KUR).

Oleh sebab itu melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018. Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi 7%

efektif pertahun, kelompok usaha sebagai calon penerima KUR, skema KUR khusus, skema KUR multisektor, pengaturan minimum porsi dan grace periode, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, plafon KUR mikro sektor produksi dan diluar sektor produksi, penyaluran KUR bersama dengan kredit lain yang diperbolehkan, struktur biaya KUR penempatan TKI, KUR untuk masyarakat daerah perbatasan, KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada penyaluran pola Kredit Usaha Rakyat ditujukan pada beberapa usaha seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit usaha rakyat ini ditujukan dalam membantu ekonomi usaha masyarakat kecil dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Dalam diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentunya perlu mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui apa

yang menjadi hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak yaitu dibitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat, Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Kecil Mataram (Asperam) Yogyakarta, Budi Sarwono, mengatakan program itu mestinya disosialisasikan secara luas agar pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak pernah mengenal akses bank mampu memanfaatkan KUR.

Maka dari itu sosialisasi mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harusnya sangat gencar-gencarnya dilakukan oleh perbankan dalam hal ini karyawan Bank BRI Unit Kalosi agar masyarakat di wilayah Kecamatan Alla lebih mengenal dan bahkan menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam melancarkan setiap usaha yang dilakukan, mengingat mayoritas masyarakat di Kecamatan Alla memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani dan pedagang pasar.

Namun Praktiknya Sosialisasi program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang oleh Bank BRI Unit Kalosi sebagai pelaksana program itu sampai kini dinilai belum maksimal sehingga tidak banyak pelaku usaha mikro dan kecil khususnya para petani dan pedagang yang mengetahui program tersebut, belum adanya pemahaman yang beragam tentang biaya KUR bagi masyarakat serta masih banyak penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya tentang ketentuan anjungan (jaminan) persyaratan administrasi sering terjadi kredit macet.

Berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis lebih mendalam akan Implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang agar implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa depan lebih meningkatkan pendapatan

ekonomi masyarakat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang secara berkelanjutan.

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah tentang: Bagaimana Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas Implementasi Program Kredit usaha Rakyat di Kecamatan Alla kabupaten Enrekang.

Menurut Siagian S.P dalam (Rahardjo:2011) mengemukakan bahwa Pengertian Implementasi merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Kemudian Bintoro

Tjokroadmudjoyo, dalam (Rahardjo:2011) mengungkapkan pengertian Implementasi ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Dalam Implementasi kebijakan dewasa ini telah diidentifikasi bahwa banyaknya masalah yang timbul. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang relatif rumit dan menyeluruh. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor, baik yang menyangkut tentang karakteristik program kebijakan maupun oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Sedangkan Program adalah urutan, serta langkah, bahkan prosedur atau tindakan yang musti dilakukan secara sistematis, berencana dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Bagi pemerintah, program sangatlah berpengaruh bahkan sering kali program disamakan dengan kegiatan-kegiatan proyek dalam

pembangunan di daerah. Pada program didalamnya terdapat semua kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan patokan atau rujukan dalam pelaksanaan proyek, baik yang menyanggung manajemen keuangan, operasional sampai pada tahap pengendalian secara evaluasi, (Winarno:2002), mengenai kinerja kebijakan mengemukakan kriteria implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sebagai berikut yaitu Efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti dicapainya keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas seringkali terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang diharapkan. (Nugroho:2015) Efisiensi menurut merupakan persamaan dari rasionlitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Kecukupan mengatakan bahwa kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tujuan yang telah dicapai telah dirasakan mencukupi dalam berbagai aspek.

Kecukupan maksudnya adalah seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang nantinya menumbuhkan adanya masalah. Sebelum suatu produk tentang kebijakan akan disahkan atau dilaksanakan musti ada kesesuaian antara metode yang akan dilaksanakan dengan suatu sasaran yang akan nantinya dicapai. Disitu akan diketahui apakah cara atau prosedur yang dilakukan sudah sesuai atau malahan menyalahi aturan atau bahkan teknik pelaksanaannya yang sudah benar. Pemerataan, mengemukakan bahwa pemerataan merupakan suatu keadilan yang diberikan atau diperoleh oleh sasaran dari kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan merupakan kebijakan yang hasil usahanya secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan mungkin dapat efektif, efisien dan merata. Inti atau kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran. Responsivitas dapat diartikan sebagai Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan suatu organisasi

untuk mengidentifikasi suatu kebutuhan masyarakat, penyusunan prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas maksudnya mengukur daya tanggap suatu organisasi terhadap harapan, keinginan dan bahkan dari aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan (Agus Dwiyanto :2006). Ketepatan tepatnya merujuk pada nilai dari tujuan program serta pada kuatnya pendapat yang melandasi tujuan tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah suatu hasil dari semua alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan dari tujuan yang layak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Alasan peneliti memilih lokasi di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kalosi karena hanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kalosi satu-satunya Bank di Kecamatan Alla yang

menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, kemudian peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara wawancara dengan informan secara langsung, kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari jurnal, dokumen-dokumen dan sebagainya.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 9 informan yang berhasil diwawancarai yaitu 3 dari pegawai Bank BRI Unit Kalosi yang didalamnya termasuk Kepala BRI Unit Kalosi, 1 dari pihak kecamatan yaitu Camat Alla, dan 5 dari masyarakat Kecamatan Alla yang menggunakan KUR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis serta fakta yang peneliti sempat temukan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Pada Bank BRI Unit Kalosi telah menerakan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 dimana didalam kebijakan tersebut terdapat penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi 7% dan kelompok usaha yang menjadi calon penerima KUR. Disini terdapat peningkatan debitur KUR dari tahun 2016-2018, hal ini disebabkan karena terdapat antusias masyarakat akan adanya dana KUR dan didukung pula dengan alasan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Alla adalah petani dan pedagang yang tentunya membutuhkan modal yang besar dalam meningkatkan usahanya.

Tabel: Jumlah Penerima KUR di Kecamatan Alla Tiga Tahun Terakhir.

No	Tahun	Jumlah
1	2016	97 orang
2	2017	111 orang

3	2018	123 orang
---	------	-----------

Sumber: BRI Unit kalosi Dalam Angka, 2019.

Pada kesempatan ini peneliti menggunakan teori dari Winarno mengenai kebijakan dalam menghasilkan informan terhadap kriteria Implementasi program ktedit usaha rakyat. Pengantar analisis kebijakan publik dimana kebijakan publik merupakan sebagai suatu proses yang menggambarkan berdasarkan kriteria-kriteria kebijakan public yang efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, serta ketepatan. Adapun yang menjadi pembahasan dari hasil penelitian di lapangan maka dari itu peneliti dapat memaparkan sebagai berikut:

Pertama efektifitas, dimana dimensi efektifitas adalah suatu yang berkaitan langsung dengan target dari pencapaian suatu tujuan dari sebuah usaha yang sempat dilakukan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan metode sosialisai desa ke desa, penyebaran brosur, spanduk, informasi dari mulut kemulut oleh masyarakat, serta pendataan merupakan suatu

metode usaha yang dilakukan untuk pencapaian target jumlah peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR), berikut temuan di lapangan. Hal yang pertama, pencapaian target jumlah peserta program KUR dengan menjadi tolak ukur efektifitas dari program KUR di Kecamatan Alla terhadap hasil (akibat) yang diharapkan dari BRI Unit Kalosi, sudah sejauh mana BRI Unit Kalosi sebagai pelaksana program KUR untuk meningkatkan jumlah peserta KUR di Kecamatan Alla. Sesuai dengna temuan yang ditemukan di lapangan implementasi Program KUR pada tiap metodenya memiliki upaya yang berbeda-beda dalam pencapaian tujuan peserta KUR ditiap metodenya yaitu sosialisasi ke desa dan spanduk, didapatkan bahwa implementasi program KUR di kecamatan Alla sudah berjalan cukup maksimal. Dalam metode spanduk sendiri sudah sangat efisien tenaga dan biaya terutama dalam mempermudah pekerjaan dari mantri KUR. Sesuai

dengan temuan yang ditemukan di lapangan implementasi Program KUR pada tiap metodenya memiliki upaya yang berbeda-beda dalam pencapaian tujuan peserta KUR di tiap metodenya yaitu sosialisasi ke desa dan spanduk, berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BRI Unit Kalosi hal yang dapat tercermin dari pernyataan informan mengatakan: “dilihat dari pihak yang melakukan sosialisasi program KUR kepada masyarakat yaitu dilakukan langsung oleh pegawai bank dalam hal ini adalah mantri KUR’ apabila diukur dari efektif atau tidaknya tentunya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dirasakan sudah efektif sebab dari sosialisasi langsung, masyarakat dapat lebih mengetahui tentang KUR dan masyarakat juga bisa lebih banyak bertanya tentang apa yang tidak dimengerti atau tidak diketahui dibandingkan dengan hanya melihat dari brosur atau spanduk namun sosialisasi ke desa hanya sekali-kali dilakukan sebab masih banyak pekerjaan kantor yang harus dikerjakan oleh mantri KUR”, dapat

terlihat bahwa implementasi program KUR sudah dapat dikatakan cukup baik terbukti dari antusias masyarakat untuk mengambil KUR dan terlihat juga dari usaha yang dilakukan para mantri dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

Kedua efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha dan seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target program, semakin singkat atau sedikit waktu yang ditemuh dan hasil yang diinginkan tercapai maka semakin baik waktu yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha atau hasil, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan target dalam pencapaian tujuan yang tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, berkaitan dengan usaha yang dilakukan Bank BRI Unit Kalosi dan sistem serta prosedur dalam pelayanan

KUR, adapun usaha yang dilakukan Bank BRI Kalosi selama ini di Kecamatan Alla adalah dengan melakukan sosialisasi ke pedesaan dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan KUR. Namun dari kesimpulannya bahwa tingkat efisiensi yang telah ada sudah berjalan dengan baik diukur dari efisiensi biaya dan waktu serta kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menggunakan KUR sudah jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maksudnya adalah bagaimana cara mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan proses yang baik dan tidak banyak hal dapat memperlambat atau bahkan merugikan yang dapat timbul dalam program tersebut. Untuk mengetahui gejala-gejala yang timbul maka dibutuhkan proses evaluasi dan salah satu indikator yang ingin dicapai adalah proses pelayanan kur dengan baik dan proses kerja yang baik dan benar.

Ketiga kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang

menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antar alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain kecukupan berarti biaya tetap dan efektivitas tetap atau dengan kata lain kecukupan dapat terpenuhi dengan adanya rasa kepuasan dari masyarakat yang menggunakan program KUR dengan seluruh proses pelayanan efek yang dirasakan oleh masyarakat serta masyarakat juga merasa puas ketika ada keluhan yang dirasakan atau kurangnya tanggapan yang baik pada debitur KUR atau pelaksana yang bertanggung jawab dapat menyelesaikan permasalahan dari masyarakat tersebut sebagai bentuk dan respon cepat untuk menyukseskan program KUR untuk mengukur kriteria kecukupan ini sebagai peneliti lebih melakukan pendalaman kepada masyarakat sebagai pengguna KUR. Informan diatas sudah merasa cukup dengan biaya KUR yang dikeluarkan karena pengambilan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mengembaiakan, Berdasarkan

penjelasan dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seberapa jauh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam program KUR ini sudah berjalan dengan baik berdasarkan dari kesimpulan informan yang merasa sudah mendapatkan kepuasan dengan adanya program KUR tersebut.

Keempat Perataan, yaitu perataan sangat erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang hasil usahanya secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan mungkin dapat efektif, efisien dan merata inti atau kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi para UMKM atas dasar kesamaan dan pemerataan. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat peserta KUR akan mendapatkan pelayanan yang baik dan

sesuai aturan yang berlaku dan dapat memenuhi persyaratan. Dengan adanya peraturan tersebut pelayanan peserta KUR saat ini sudah berjalan dengan baik, wawancara juga dilakukan dengan informan lain dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sangat baik terlihat dari pelayanan yang cepat dan tepat yang diberikan kepada peserta KUR serta tidak dibeda-bedakannya antara debitur KUR dengan debitur lain dalam hal pelayanan. Berdasarkan dari hasil penelitian sebagai penulis saya dapat menarik kesimpulan bahwa program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang mengenai pemerataan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pencapaian kesejahteraan namun belum dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berjalan dengan sempurna karena masih ada berbagai hal yang musti dibenahi dengan baik untuk mencapai kesempurnaan program tetapi secara umum program ini sudah berhasil dalam pemerataan pelayanan yang baik.

Kelima responsivitas, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran target kebijakan apakah mendapatkan pelayanan yang baik atau tidak, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas berbicara tentang apakah kriteria, efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas pada program KUR ini relative baik.

Tujuan pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan memuaskan, oleh karenanya seorang penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan warga pengguna tersebut.

Dalam instansi pemerintah yang menjadi pelayan public pengukuran kinerjanya menjadi sangat penting

dalam hal menilai seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dalam hal pemberian pelayanan, selain itu pengukuran kerja juga dapat dijadikan tolak ukur apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja pelayanan yang ada. Itu sebabnya dengan adanya informasi tentang penilaian kerja tersebut dapat dijadikan atau rujukan dalam membenahi kinerja agar lebih sistematis dan tepat arah sehingga tujuan ataupun misi organisasi bisa tercapai dengan baik dan pelayanan public yang diberikan bisa lebih optimal. Dengan adanya kinerja birokrasi yang tinggi maka organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, efisien dan responsif dalam memberikan pelayanan. bahwa program ini diterima dikalangan masyarakat dengan baik berkenaan dengan jumlah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan suatu kebutuhan preferensi. Maka dari itu tanggungjawab dapat dikatakan berjalan dengan semestinya yang

diharapkan oleh masyarakat tersebut oleh karena itu evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implemetasi berkaitan dengan perumusan sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan. Pengakuan juga sudah didapatkan dari ketua BRI Unit Kalosi yang menyatakan bahwa pelayanan yang kami berikan sudah baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang saya lakukan kepada informan terkait bahwasannya dapat ditarik kesimpulan program kredit uaha rakyat berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan Alla, ini disebabkan karena bebrapa aspek seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan atau kesamaan dan bahkan responsifitas sudah mendapatkan kepuasan dari masyarakat bawalaupun belum bisa dikatakan bahwa tingkat responsifitasnya sudah mencapai tahap sempurna.

Keensm Ketepatan, yaitu secara dekat adalah berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan mengenai masalah

ketepatan kebijakan tidaklah berkenaan dengan satu kriteria individu namun dua atau lebih kriteria secara bersama-sama ketepatan merujuk pada nilai atau tujuan-tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi suatu tujuan dalam sebuah kebijakan public melihat dari segi sasaran apakah sudah tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BRI Unit Kalosi, menyatakan: “kalau berbicara sudah tepat sasarankah program KUR ini diberikan kepada masyarakat tentunya menurut saya sudah sangat tepat sasaran sebab dengan adanya program KUR ini sangat membantu khususnya masyarakat yang mau melancarkan usahanya namun terkendala dengan biaya maka dari itu program ini hadir untuk sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat”. Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program kredit usaha rakyat ini benar-benar sudah tetpat sasaran diberikan kepada masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan melalui ekonomi, sehingga kebijakan ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Alla.

Sehubungan dengan itu pernyataan yang hamper serupa juga diutarakan oleh mantri KUR, menyatakan: “kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah untuk rakyat, tentunya melalui perumusan yang panjang untuk bagaimana bisa program ini nantinya memiliki dampak yang baik bagi masyarakat dan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai penyalur untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat”. Dalam program kredit usaha rakyat pemerintah sebelum dalam melakukan implemetasi harus melakukan pertimbangan yang panjang mengenai apakah dari implementasi itu nantinya didalamnya sudah ada kepetingan public kemudian setelah berjalan kebijakan itu harus pula ada control yang baik agar tujuan dalam program tercapai dengan baik dan semua masalah yang timbul dalam proses pengimplementasian program berjalan dengan baik tanpa kendala dan semua

kendala dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan masyarakat pengguna KUR, menyatakan “selama saya menjadi debitur KUR mengenai ketepatan waktu dalam melayani menurut saya sudah sangat maksimal karena tidak memakan waktu yang panjang, terlebih lagi dengan ketepatan jumlah uang yang diterima selalu sesuai dengan yang menjadi permohonan saya. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan keseriusan dari pihak penyalur dalam hal ini Bank BRI Unit Kalosi dalam memberikan pelayanan bagi program KUR ini kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Alla. Program KUR ini juga memberikan kemudahan terhadap masyarakat di Kecamatan Alla, dengan adanya pelayanan yang cepat, mudah dan tidak berbelit-belit sehingga itu menjadi salah satu yang sangat membantu masyarakat pengguna KUR. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BRI unit Kalosi, menyatakan ; “dari ketepatan waktu masyarakat dalam melakukan penyetoran sudah

sangat baik, namun ada saya pihak yang biasa menunggak disebabkan karena mereka kembali ke tempat asal dan yang biasa seperti ini adalah yang berasal dari Jawa yang tidak melunasi pembayaran lalu menghilang”. Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan yang diberikan oleh informan dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aspek ketepatan sasaran dari program kredit usaha rakyat sudah berjalan dengan baik dengan kesimpulan dari para informan yang menyatakan kepuasannya terhadap program kredit usaha rakyat dan proses respon pelayanan yang diberikan oleh pihak penyalur terkait seluruh unsur yang berpengaruh dalam program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yang perlu dipahami dalam suatu program kebijakan pemerintah adalah penguasaan terhadap tiga jenis kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan teknis dan sikap

perilaku. Dalam menjalankan suatu kebijakan hal yang paling mendasar adalah ketepatan atau sasaran untuk program tersebut.

Dari hasil penelitian dari seluruh yang mengkaji kriteria indikator keberhasilan program pelaksanaan menurut winarno yang memperhatikan enam aspek yaitu, efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan dengan memadukan antara keterampilan teknis sikap dan perilaku organisasi penulis menyimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan kepuasan dalam program kredit usaha rakyat dan menandakan keberhasilan program KUR.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, maka berdasarkan dari kebijakan dapat ditarik kesimpulan 6 (kriteria) dalam pelaksanaan kebijakan sudah berhasil atau tidak. Berdasarkan tujuan yang terdapat pada latar belakang tentang mengevaluasi program Kredit Usaha

Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa: Efektifitas, dalam konteks efektifitas sudah berjalan cukup baik diantara metode yang cukup berhasil adalah metode sosialisasi ke desa-desa dari metode ini banyak yang mengetahui tentang KUR. Sebagai peneliti dapat saya simpulkan bahwa pihak bank sebagai penyalur sudah mengejakan tugasnya dengan maksimal dalam pengimplementasian Program KUR di kecamatan Alla. Efisiensi, dalam kesimpulan dalam proses penelitian sebagai peneliti dapat saya menyimpulkan program KUR berhasil dengan baik dalam masyarakat kecamatan Alla, terbukti dengan adanya spanduk mengenai KUR jadi masyarakat lebih mudah dan cepat mengetahui mengenai program KUR ini di Kecamatan Alla. Kecukupan, selaku penulis dapat menarik kesimpulan bahwa program KUR sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan kepuasan bagi masyarakat khususnya pengguna KUR. Pemerataan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program KUR di

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, pemerataan dalam hal pelayanan sudah dilakukan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pencapaian program .Responsivitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa program kredit usaha rakyat sudah berjalan dengan baik hal ini dikarenakan beberapa aspek seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas sudah mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Ketepatan program kredit usaha rakyat dengan adanya kepuasan masyarakat dalam suatu kebijakan maka hal itu menandakan bahwa ketepatan program sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2003. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nugroho, Rian. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Wanggi, V. Velix. 2012. *Pembangunan Untuk Semua*. Jakarta: Bina Graha.
- Wardhana, Aditya dan Iba, Zainuddin. *Analisis Kinerja Implementasi Progrsm Kinerja Usaha Rakyat (KUR) Tingkat Propinsi Di Indonesia.*// Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh. Vol. IV No 8. September 2013.
- Winarno,Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan.
- Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.